



# PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

## DINAS PERTANIAN

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Pangi, Kec. Dulupi  
website: <http://pertanian.boalemokab.go.id> ; email: [distanbun@boalemokab.go.id](mailto:distanbun@boalemokab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 49 TAHUN 2022

#### TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari integral dari pembangunan daerah Kabupaten Boalemo, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2023-2026;
  - b. Bahwa mengefektifkan dan mengoptimalkan proses penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nomor 3478);
6. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 7);
12. Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah Kabupaten Boalemo tahun 2011-2005;
13. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 484).

14. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Boalemo;
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan fungsi dan Tatakerja Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.
16. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo 2017-2022.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

## **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026.**
- KESATU** : Membentuk Tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah
- a. Mengkaji dan mengevaluasi Renstra SKPD Tahun 2023-2026 termasuk capaian kemajuannya;
  - b. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo
  - c. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2023-2026
  - d. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan renstra
  - e. Menyusun Renstra SKPD Tahun 2023-2026

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dulupi  
Pada tanggal : 31 Maret 2022

**KEPALA DINAS**

**ROSLINA R. KARIM, SP**  
Pembina Tkt. IV/b  
NIP. 19680720 199903 2 004



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO.**

**NOMOR : TAHUN 2022**  
**TANGGAL : 31 MARET 2022**  
**TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS**  
**PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023-2026**

---

---

**SUSUNAN TIM :**

**Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.**

Koordinator : KEPALA DINAS  
Ketua : SEKRETARIS  
Sekretris : FUNGSIONAL PERENCANA PERTANIAN  
Anggota :

1. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN
2. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3. KEPALA BIDANG PETERNAKAN
4. KEPALA BIDANG PENYULUHAN
5. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
6. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
7. ANALIS KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN

Ditetapkan di : Dulupi  
Pada tanggal : 31 Maret 2022



**ROSLINA R. KARIM, SP**  
Pembina Tkt.1 IV/b  
NIP. 19680720 199903 2 004

# **LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO**

**NOMOR :  
TAHUN : 2022  
TANGGAL : 17 APRIL 2022  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO  
TAHUN 2023-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**

# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BOALEMO**

**Tilamuta, 17 April 2022**



# PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

## DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2023 - 2026

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 dapat terselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini secara umum terdiri dari enam bagian yang meliputi : bagian pertama berisi latar belakang, manfaat dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyajian; bagian ke dua berisi gambaran pelayanan dinas; bagian ke tiga berisi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dinas; bagian ke empat berisi visi, misi, tujuan, strategis dan kebijakan; bagian ke lima berisi rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan inidkatif; serta bagian ke enam berisi indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini nantinya akan menjadi bahan pedoman dan arahan program dan kegiatan pada selang Tahun 2023-2026. Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Strategis (Renstra) dinas ini masih perlu penyempurnaan dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang akan dilalui selang Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, kritik dan sasaran perbaikan sangat diharapkan. Selanjutnya atas segala dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik dalam penyusunan Renstra dinas ini disampaikan terima kasih.

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini bermanfaat bagi kita sekalian. Aamiin.

Dulupi, Juli 2022

**KEPALA DINAS**

**ROSLINA R. KARIM, SP**

**Pembina Tkt.I IV/b**

**NIP. 19680720 199903 2 004**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penyusunan .....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	8
2.2 Sumberdaya Manusia Dinas.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo .....	16
2.3.1 Capaian Terhadap Sasaran Renstra Periode Sebelumnya .....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo .....	22
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO .....	24
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo .....	24
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 .....	24
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (K/L) .....	26
3.4 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	28
3.4.1 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kab.Boalemo.....	28
3.4.2 Telaah Terhadap Hasil Kajian Lingkup Hidup Strategis Kabupaten Boalemo.....	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian Kab. Boalemo .....	31
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	32
4.1. Tujuan .....	32
4.2. Sasaran .....	32
4.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perangkat Daerah.....	33

BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN .....	36
5.1.    Strategis .....	36
5.2.    Kebijakan .....	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	39
BAB VII. KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....	44
BAB VIII. PENUTUP .....	47

RENSTRA TAHUN 2023-2026

# DAFTAR TABEL

2.2.1	Keadaan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	12
2.2.2	Keadaan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Penyuluh Berdasarkan Jenis Kelamin .....	12
2.2.3	Keadaan Pegawai Tidak Tepat (PTT) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
2.2.4	Keadaan Pegawai Penyuluh Tidak Tepat (PTT) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	13
2.2.5	Keadaan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Berdasarkan Pendidikan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022 .....	13
2.2.6	Keadaan Pegawai Tidak Tepat (PTT) Berdasarkan Pendidikan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022 .....	14
2.2.7	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022 .....	14
2.2.8	Keadaan Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022 .....	15
2.2.9	Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sampai dengan Tahun 2022 .....	15
2.3.1	Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022 .....	17
2.3.2	Nilai Tukar Petani (NTP) .....	17
2.3.3	Luas Tanam Tanaman .....	18
2.3.4	Populasi Ternak .....	18
2.3.5	Pendapatan Asli Daerah (PAD) selang 4 Tahun sebelumnya .....	19
2.3.6	(TC-23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 .....	20
2.3.7	(TC-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022 .....	21
4.1	(TC-25) Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 .....	34
5.1	(TC-26) Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 .....	38
6.1	(TC-27) Rencana Program, Kegiatan Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SOPD Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 .....	40
7.1	(TC-28) Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 .....	44
7.2	Formula Pengukuran .....	45



Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 mengamanatkan adanya perbaikan dan penajaman kegiatan perangkat daerah Kabupaten Boalemo dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan serta akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan. Nota kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD (343 ayat 2), bahwa perubahan tersebut akibat terdapat kebijakan Nasional atau Provinsi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan (343 ayat 3) dan perubahan tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (343 ayat 9).

Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang diberikan tugas pokok dan fungsi pada urusan pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Prasarana dan Sarana Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Penyuluhan) harus menjabarkan lebih terperinci pada Rencana Perangkat Daerah (RPD) tersebut ke dalam Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian ini menjadi bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dinas tahunan. Mengingat peran dan fungsi Renstra SKPD Kabupaten Boalemo sangat strategis, maka penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dilakukan secara transparan, aspiratif dan partisipatif.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nomor 3478);
2. Undang – undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010 – 2030;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo 2011 – 2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boalemo 2011 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

---

### 1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023 - 2026 di susun dengan maksud memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian selama rentang waktu 4 (empat) tahun dalam kerangka pencapaian program/kegiatan/sub-kegiatan.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Dinas Pertanian yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta arah kebijakan umum anggaran (KUA) pembangunan pertanian. Secara terperinci, penyusunan Renstra ini bertujuan :

- a. Sebagai acuan dalam menyusun rencana program dan kegiatan beserta besaran anggaran yang dibutuhkan (indikatif) berbasis kinerja pembangunan pertanian;
- b. Sebagai acuan penjabaran rencana kerja (Renja) melalui serangkaian program dan kegiatan serta besaran anggaran yang dibutuhkan setiap tahunnya;
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan berdasarkan kinerja pembangunan pertanian;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, tertib dan transparan serta akuntabel sehingga memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

### Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

### Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

*Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme)*

#### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

*Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.*

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

*Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan tujuan dan sasaran serta target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.*

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan perangkat Daerah

*Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisi terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun*

*mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.*

**Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

*Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.*

**3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

*Pada bagian ini mengemukakan Rencana Pembangunan Daerah 4 (empat) tahun ke depan dengan menselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2025*

**3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (K/L) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

*Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Lembaga (K/L) ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.*

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

*Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.*

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

*Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :*

1. *Gambaran pelayanan perangkat daerah;*
2. *Sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis Kementerian (K/L);*
3. *Sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;*
4. *Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan*
5. *Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan di tangani melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Rencana.*

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

*Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.*

Bab V : Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program/kegiatan/sub-kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 4 (Empat) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Perangkat Daerah (RPD).

Bab VIII : Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO

#### 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2022 yang di jabarkan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Saran, serta Penyuluhan Pertanian untuk Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Melakukan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Saran, serta Penyuluhan Pertanian;
- Melakukan pelayanan umum di bidang pertanian;
- Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan sumber daya aparat pertanian dan petani;
- Melakukan koodinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pelayanan dibidang pertanian; dan
- Melakukan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pertanian.

Sesuai dengan peraturan diatas, maka struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo terdiri dari :

##### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupti. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 430, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas;
- b. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Mengawasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas;
- d. Melakukan pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksana program dan kegiatan dinas;
- e. Melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonstrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan kepada kabupaten;
- f. Melaksanakan kebijakan pembangunan pertanian dan bertanggungjawab kepada kepala daerah serta menyampaikan laporan berkala dan insidental;

- g. Menyampaikan saran, pertimbangan kepada Bupati mengenai langkah atau tindakan yang perlu dilakukan dalam bidang tugasnya;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait baik tingkat daerah maupun tingkat pusat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Sekretaris Dinas**

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 432, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengoordinasikan rencana program dan kegiatan serta penyusunan bahan laporan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Mengoordinasikan kegiatan operasional perencanaan, administrasi umum, ketatausahaan, perpustakaan, arsip, kepegawaian, kehumasan, protokol, pengelolaan perlengkapan rumah tangga dinas, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup sekretariat Dinas Pertanian;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat berupa pengkajian kebijakan teknis dibidang sekretariat;
- e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- f. Memfasilitasi penyusunan bahan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, IKU, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Dinas Pertanian;
- g. Memfasilitasi penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan (SP);
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Dinas Pertanian;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Pertanian;
- j. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan di Lingkungan Dinas Pertanian;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugas nya;
- l. Membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m. Memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan

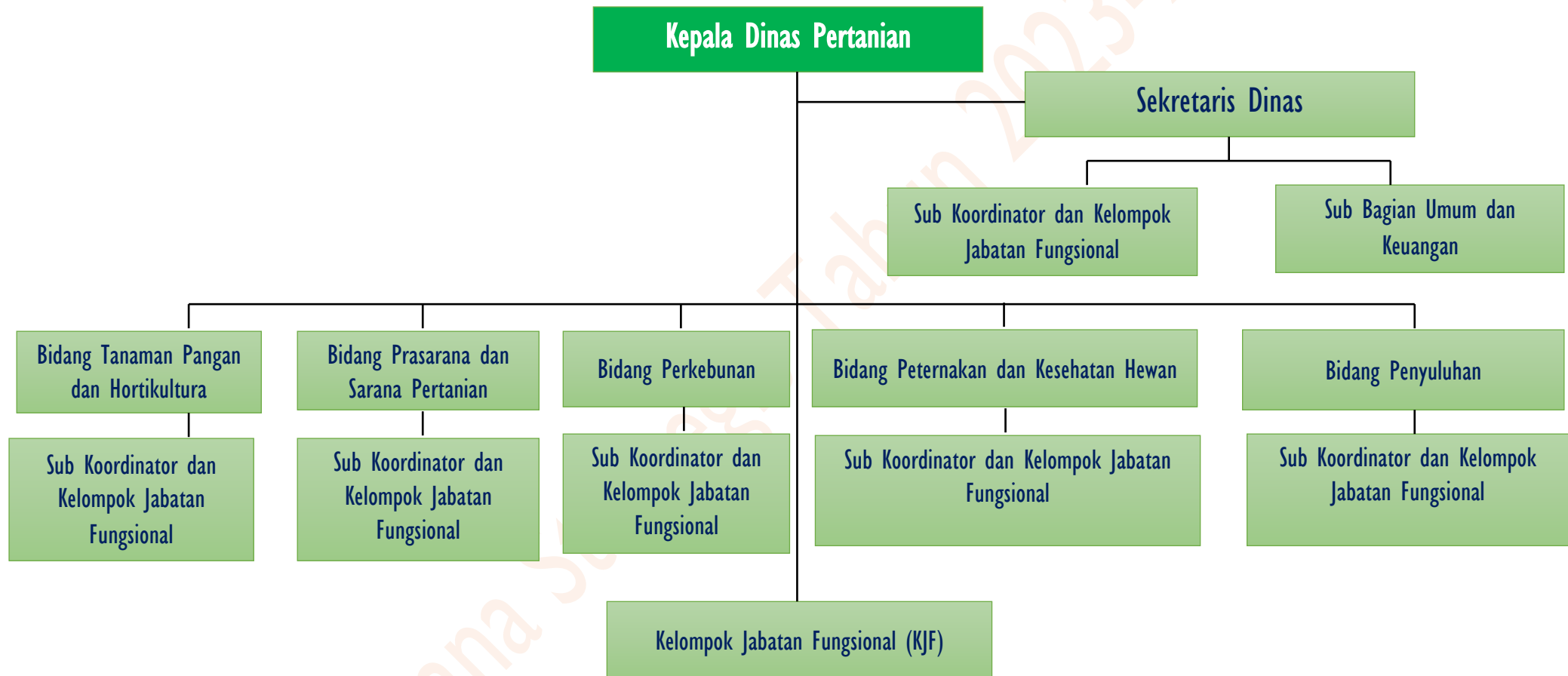
o. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas membawahi;

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :
  - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
  - Bidang Perkebunan, membawahi :
  - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
  - Bidang Penyuluhan, membawahi :

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dapat digambarkan sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo  
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022  
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pada Dinas Daerah Kabupaten Boalemo



## 2.2 Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan deokratis. Good Governance digerakan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakkan hokum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisiensi, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualiatas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemeritahan menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dalam menjalankan tugas dan fungsinya mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. Suber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan Pertanian Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**

Keadaan Aparatur Sipil Negeri (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki — Laki	21
2.	Perempuan	19
Total		40

**Tabel 2.2.2**

Keadaan Pegawai Penyuluh ASN Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki — Laki	25
2.	Perempuan	28
Total		63

**Tabel 2.2.3**

Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki — Laki	17
2	Perempuan	10
	Total	27

**Tabel 2.2.4**

Keadaan Pegawai Penyuluh Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Jenis Kelamin  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki — Laki	16
2	Perempuan	19
	Total	27

**Tabel 2.2.5**

Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	4
2	Sarjana (S1)	58
3	Diploma-III	5
4	SMA	36
5	SMP	-
	Total	103

**Tabel 2.2.6**  
Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Berdasarkan Pendidikan  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	-
2	Sarjana (S1)	29
3	Diploma-III	5
4	SMA	23
5	SMP	-
	<b>Total</b>	<b>62</b>

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan sebagai Kepala Instansi, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian rata-rata pendidikan Strata-1. Kondisi tersebut dilihat dari kualitasnya cukup memadai, dan untuk meningkatkan kualitas kemampuan teknis administrative maupun di bidang pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo telah mengikuti sertakan sejumlah pegawai dalam diklat penjenjangan, diklat kepemimpinan, diklat fungsional serta diklat teknis lainnya. Dengan demikian kualitas pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo baik staf maupun pejabatnya memiliki kemampuan yang memadai dalam menangani urusan perkantoran maupun pengelolaan sektor pertanian Kabupaten Boalemo.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo di lihat dari pangkat dan golongannya, yakni sebagai berikut :

**Tabel 2.2.7**  
Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/b	1
2	Golongan IV/a	9
3	Golongan III/d	30
4	Golongan III/c	14
5	Golongan III/b	17
6	Golongan III/a	11
7	Golongan II/d	7
8	Golongan II/c	4
9	Golongan II/b	11
	<b>Total</b>	<b>103</b>

**Tabel 2.2.8**

Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN) Berdasarkan Eselon  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2022

No	Eselon	Jumlah
1	EselonII	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	5
4	Eselon IV	9
Total		16

Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo menempati Kantor yang berdiri di atas lahan seluas 9.806 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Boalemo yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Pangi Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo yang secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.9**

Jumlah Sarana dan Prasarana  
Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo sampai dengan dengan Tahun 2022

No	Nama Barang	Banyaknya (Unit)	Kondisi Barang					Ket
			B	KB	RB	TDK	PL	
1	Kendaraan Roda 4	6	4	-	2	-	-	-
2	Kendaraan Roda 3	13	-	-	2	-	-	-
3	Kendaraan Roda 2	168	111	-	11	36	10	-
4	Kendaraan Roda 6	2	1	-	-	-	--	-
5	Traktor Roda 2	16	1	1	14	-	-	Diserahkan ke Masyarakat
6	Traktor Roda 4	3	1	-	2	-	-	-
7	Mesin Genset	7	2	-	-	5	-	-
8	Mesin Potong Rumput	47	11	-	36	-	-	Diserahkan ke Masyarakat
9	Kipas Angin	4	-	-	-	4	-	-
10	PC Unit	18	-	-	4	14	-	-
11	Note Book	71	34	-	6	31	-	-
12	Printer	75	7	-	8	60	-	-
13	Sound System	16	11	-	-	5	-	-
14	Iemari	32	15	-	2	15	-	-
15	Meja	97	87	-	10	-	-	-
16	Scanner	1	1	-	-	-	-	-
17	Laptop	34	31	-	3	-	-	-
18	LCD Projektor	8	4	-	4	-	-	-

19	AC	13	11	-	2	-	-	-
20	Sound System	9	8	-	1	-	-	-
21	Printer	10	10	-	-	-	-	-
22	Televisi	5	3	-	-	2	-	-

Lokasi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo. Lokasi yang terpisah dari kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Boalemo di jalan Trans Sulawesi Desa Pangi kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (computer, scanner, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo

### 2.3.1 Capaian Terhadap Sasaran Renstra Periode Sebelumnya

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan. Untuk itu, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi dengan melihat kondisi saat ini sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor yang memberi kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Boalemo sejak Tahun 2017 hingga 2021. Struktur Ekonomi Kabupaten Boalemo tahun 2021 di dominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 55,67% bahkan dimasa depan, bukan tidak mungkin menjadi leading sektor.

Tabel 2.3.1

Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo

No	Uraian	Realisasi Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	PDRB	2.490.580	54,93	2.735.500	55,23	3.035.710	56,10	3.064.960	55,81	3.191.880	55,67

## 2. Nilai Tukar Petani (NTP)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional sebesar 108,34 per Desember Tahun 2021. Angkanya naik 1,08 % dari posisi November Tahun 2021, yakni 107,18 0/0. Hal ini merupakan Nilai Tukar Petani (NTP) salah satu Indikator relative yang menunjukkan kemampuan petani dalam meningkatkan pendapatannya. Nilai Tukar Petani (NTP) dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Pada Tahun 2021, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan dbandingkan Tahun 2020. Peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor Tanaman Pangan.

Tabel 2.3.2

Nilai Tukar Petani (NTP)

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
		%	%	%	%	%
1	NTP	103,06	103,81	102,26	101,31	108,34

## 3. Produksi Tanaman

Strategis pertanian untuk mempertahankan perkembangan ekonomi yakni dengan mempertahankan komoditas-komoditas pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Komoditas-komoditas strategis tersebut diantaranya komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dengan melihat kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Boalemo, Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo mempunyai Komiditas Tanaman Unggulan yang mampu meningkatkan perkembangan ekonomi dengan menjadikan luas tanam adalah salah satu faktor penentu tercapainya target produksi.

**Tabel 2.3.3**  
Luas Tanam Tanaman

No	Jenis Tanaman	Realisasi Tahun (ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Padi	12.534	12.532	16.480,6	9.578,5	9.281,7
2	Jagung	82.493	111.513	111627	80.768	108.089
3	Cabe Rawit	208	150	44	289	71
4	Tomat	52	28	18	53	20
5	Durian	-	-	15	20	5
6	Kelapa	9.079	8.255	8.395	8.645	8.745
7	Kakao	4.486	4.047	4.047	3.960	3.831,90

#### 4. Populasi Ternak

Selain mempertahankan perkembangan ekonomi dengan mempertahankan komoditas-komoditas pada tanaman unggulan, populasi ternak juga bisa dapat meningkatkan produksi pertumbuhan ekonomi dibidang pertanian. Hal ini bisa di lihat pada tabel dibawah,

**Tabel 2.3.4**  
Populasi Ternak

No	Uraian	Realisasi dalam pertahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sapi	12.532	16.480,6	9.578,5	9.281,7
2	Kambing	111.513	111627	80.768	108.089
3	Ayam	150	44	289	71

Capaian terhadap sasaran pada Renstra periode sebelumnya, dapat dilihat pada tabel dibawah, yakni dengan adanya strategi-strategis di atas yang mampu mempertahankan pertumbuhan perekonomian di bidang pertanian cukup berhasil. Selain dengan adanya sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan/perkembangan ekonomi, pendapatan daerah pun berdampak dengan hal tersebut. Sehingga untuk itu. Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo mendapatkan pendapatan dari hasil retribusi daerah meliputi Retribusi Tempat Pelelangan Ternak sebesar Rp.30.000.000,- , Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah dengan Penyewaan Tanah Bangunan sebesar Rp.30.000.000,- dan Retribusi Kekayaan Daerah/ Alat Berat Rp. 25.000.000,- pada tahun terakhir (Tahun 2021).

**Tabel 2.3.5**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selang 4 Tahun sebelumnya

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	80.000.000	80.000.000	100
2	2019	100.000.000	100.000.000	100
3	2020	20.000.000	20.000.000	100
4	2021	80.000.000	85.000.000	106,25

Hal ini dapat dilihat pada indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan disertai dengan anggaran yang diberikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pertanian di Kabupaten Boalemo cukup memadai.

**TABEL TC-23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2022**  
**DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO**

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGI PERANGKAT DAERAH	TARGET MSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE -					REALISASI CAPAIAN									
				TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
<b>Kategori Bidang Pemerintahan</b>																		
1				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	94.63 %	95.45 %	99.15 %	99 %	0.00 %	0.95 %	0.95 %	0.99 %	0.00 %	
2				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	97.74 %	97.83 %	98.25 %	90 %	0.00 %	0.98 %	0.98 %	0.98 %	0.00 %	
3				B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	B Predikat	0.00 Predikat	1.00 %	1.00 %	1.00 %	0.00 %	
4				45 Nilai	50 Nilai	55 Nilai	60 Nilai	75 Nilai	45 Nilai	- Nilai	- Nilai	- Nilai	0.00 Nilai	1.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
5				2.75 Skala	3 Skala	3.25 Skala	3.5 Skala	3.75 Skala	- Skala	- Skala	- Skala	- Skala	0.00 Skala	1.36 %	0.00 %	0.00 %	%	
<b>Kategori Bidang Pertanian</b>																		
1				10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	0 %	10 %	16 %	17 %	0.80 %	0.67 %	0.80 %	0.68 %	0.00 %	
2				106 %	107 %	107	107 %	107 %	103.61 %	102.26 %	101.31 %	106.67 %	0.98 %	0.96 %	0.95 %	1.00 %	0.00 %	
3				56000 Ton	56500 Ton	57.000 Ton	57.500 Ton	58.000 Ton	34.637 Ton	36.250 Ton	36.704 Ton	29.283 Ton	0.62 %	0.64 %	0.64 %	0.51 %	0.00 %	
4				160000 Ton	180000 Ton	200.000 Ton	220.000 Ton	250.000 Ton	438.390 Ton	752.572 Ton	430.551 Ton	449.346 Ton	0.00 Ton	2.74 %	4.18 %	2.15 %	2.04 %	
5				250 Ton	275 Ton	300 Ton	350 Ton	420 Ton	336 Ton	101.460 Ton	11.28 Ton	514.4 Ton	0.00 Ton	1.34 %	0.37 %	0.04 %	1.47 %	
6				24.000 Ton	4.173 Ton	25.000 Ton	25.500 Ton	26.000 Ton	3.278 Ton	30.28 Ton	34.38 Ton	20.92 Ton	0.00 Ton	0.14 %	0.01 %	0.00 %	0.00 %	
7				7500 Ton	1770 Ton	7.700 Ton	7.800 Ton	8.000 Ton	823 Ton	695.48 Ton	877.3 Ton	38.75 Ton	0.00 Ton	0.11 %	0.39 %	0.11 %	0.00 %	
8				5.6 Kw/Ha	5.6 Kw/Ha	5.6 Kw/Ha	5.6 Kw/Ha	5.6 Kw/Ha	42.06 Kw/Ha	43.80 Kw/Ha	44.81 Kw/Ha	45.79 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	7.51 %	7.82 %	8.00 %	8.18 %	
9				5 Kw/Ha	5.2 Kw/Ha	5.3 Kw/Ha	5.5 Kw/Ha	5.5 Kw/Ha	39.31 Kw/Ha	43.95 Kw/Ha	46.47 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	7.86 %	8.45 %	8.77 %	8.31 %	0.00 %	
10				1.25 Kw/Ha	1.35 Kw/Ha	1.4 Kw/Ha	1.45 Kw/Ha	1.4 Kw/Ha	12 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	14 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	9.60 %	10.99 %	9.12 %	9.66 %	
11				12 Kw/Ha	12.5 Kw/Ha	13 Kw/Ha	13.5 Kw/Ha	14 Kw/Ha	50.9 Kw/Ha	52.02 Kw/Ha	93.82 Kw/Ha	9.22 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	4.24 %	4.23 %	7.22 %	0.68 %	
12				30 Kw/Ha	31 Kw/Ha	32 Kw/Ha	33 Kw/Ha	34 Kw/Ha	70 Kw/Ha	198.71 Kw/Ha	165.53 Kw/Ha	14.53 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	2.33 %	6.41 %	5.17 %	0.44 %	
13				8.500 Ton	8.600 Ton	8.800 Ton	8.800 Ton	9.000 Ton	6.703 Ton	6.446 Ton	7.591 Ton	7.863 Ton	0.00 Ton	0.79 %	0.75 %	0.87 %	0.89 %	
14				1.150 Ton	1.250 Ton	1.300 Ton	1.300 Ton	1.500 Ton	1.053 Ton	962 Ton	350 Ton	623 Ton	0.00 Ton	0.92 %	0.77 %	0.26 %	0.43 %	
15				1.4 Kw/Ha	1.42 Kw/Ha	1.43 Kw/Ha	1.44 Kw/Ha	1.45 Kw/Ha	7.4 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	14 Kw/Ha	14.37 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	5.29 %	6.83 %	9.79 %	9.98 %	
16				0.75 Kw/Ha	0.78 Kw/Ha	0.8 Kw/Ha	0.85 Kw/Ha	0.90 Kw/Ha	6.3 Kw/Ha	4.48 Kw/Ha	5.70 Kw/Ha	0.00 Kw/Ha	8.40 %	8.53 %	5.60 %	6.71 %	0.00 %	
17				40.000 Ekor	45.000 Ekor	50.000 Ekor	55.000 Kg	60000 Kg	47.795 Ekor	0.00 Ekor	44.661 Ekor	44.667 Ekor	0.00 Ekor	1.19 %	1.06 %	0.89 %	0.81 %	
18				8.000 Ekor	8.500 Ekor	9.000 Ekor	9.500 Kg	10000 Kg	9.776 Ekor	0.00 Ekor	11.861 Ekor	12.048 Ekor	0.00 Ekor	1.22 %	1.18 %	1.32 %	1.27 %	
19				300.000 Ekor	350.000 Ekor	400.000 Ekor	450.000 Kg	500000 Kg	213.434 Ekor	3.391 Ekor	3.990 Ekor	0.00 Ekor	0.71 %	0.01 %	0.01 %	0.89 %	0.00 %	
20				120.000 Butir	122.000 Butir	124.000 Butir	126.000 Butir	127000 Butir	109.000 Butir	215.251 Butir	2.393 Butir	514.650 Butir	0.00 Butir	0.91 %	1.76 %	0.02 %	4.08 %	
21				106.37 Km	116.37 Km	126.37 Km	136 Km	146.37 Km	106 Km	141.82 Km	100 Km	21.43 Km	0.00 Km	1.00 %	1.22 %	0.79 %	0.16 %	

DINAS PERTANIAN

Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo

Tabel TC-24

**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian  
Kabupaten Boalemo Tahun 2018-2022**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Asli Daerah	80.000.000	100.000.000	20.000.000	85.000.000	100.000.000	80.000.000	100.000.000	20.000.000	85.000.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
Hasil Retribusi Daerah	80.000.000	100.000.000	20.000.000	85.000.000	100.000.000	80.000.000	100.000.000	20.000.000	85.000.000	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-		
Belanja Tidak Langsung	5.976.165.089	9.056.346.477	8.024.775.561	8.690.764.932	8.886.513.843	4.486.184.619	8.437.575.172	7.997.457.278	8.602.365.158	-	0,75	0,93	1,00	0,99	-		
Gall dan Tuninven	5.976.165.089	9.056.346.477	8.024.775.561	8.690.764.932	8.886.513.843	4.486.184.619	8.437.575.172	7.997.457.278	8.602.365.158	-	0,75	0,93	1,00	0,99	-		
Belanja Langsung	15.122.769.000	15.307.064.000	42.081.689.522	15.350.391.391	9.501.905.523	14.026.761.359	22.595.543.964	39.996.514.888	15.090.854.530	-	1,88	2,59	1,95	0,98	-		
- Dana Alokasi Umum	11.907.960.000	12.360.000.000	40.356.489.522	15.350.391.391	5.901.905.523	10.929.380.526	19.648.479.964	38.271.314.888	15.090.854.530	-	0,92	1,59	0,95	0,98	-		
- Dana Alokasi Khusus	3.214.809.000	2.947.064.000	1.725.200.000	-	3.600.000.000	3.097.380.833	2.947.064.000	1.725.200.000	-	-	0,96	1,00	1,00	-	-		
Total	21.178.934.089	24.463.410.477	50.126.465.083	24.126.156.323	18.488.419.366	18.592.945.978	31.133.119.136	48.013.972.166	23.778.219.688	-	3,63	4,52	3,94	2,97	-		

Dari penjabaran anggaran diatas maka, akumulasi Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yakni :

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2018	21.178.934.089	18.592.945.978	88
2	2019	24.463.410.477	31.133.119.136	127,26
3	2020	50.126.465.083	48.013.972.166	95,79
4	2021	24.126.156.323	23.778.219.688	98,56

Dari akumulasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa, peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya. Penyerapan anggaran rata-rata di atas 90 % dalam penyerapan. Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari Indikator Kinerja turut menentukan serapan dan alokasi Anggaran yang dibutuhkan.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo

Pertanian masih merupakan sektor dominan yang berkontribusi besar dalam perekonomian di Kabupaten Boalemo. Secara Nasional, sektor ini mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha atau lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menjadikannya sebagai resource based sector. Namun demikian, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian masih rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang bersifat strategis guna mengakselerasi percepatan pembangunan sektor ini.

Arah kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Boalemo lebih dititik beratkan pada:

- Mengembangkan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan yang produktif sebagai sumber bahan pangan;
- Mengembangkan usaha pertanian tanaman perkebunan yang produktif sebagai sumber bahan agro industri;
- Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan;
- Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Kabupaten Boalemo memiliki potensi sumberdaya pertanian yang sangat besar, baik pada level hulu (on farm) sampai level hilir (offfarm). Namun demikian, terdapat faktor-faktor pembatas dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdaya tersebut, sehingga upaya untuk pertahankan keberlanjutan pembangunan sektor pertanian harus menjadi usaha kolektif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten

Boalemo. Beberapa permasalahan yang harus dijadikan bahan pertimbangan untuk dapat diselesaikan, antara lain:

- a. Tingkat degradasi lahan akibat intensitas pertanian yang tinggi pada lahan dengan kemiringan >15% tanpa menerapkan kaidah konservasi tanah dan air menyebabkan penurunan kesuburan tanah, meluasnya lahan kritis, penurunan produksi dan produktifitas pertanian;
- b. Anomali dan perubahan iklim mengakibatkan terjadinya musim kemarau yang panjang, musim penghujan yang berpotensi banjir dan serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan penurunan produksi dan produktifitas pertanian;
- c. Meningkatnya tren alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk pemukiman dan pembangunan wilayah;
- d. Masih tingginya kehilangan hasil karena kurangnya penanganan panen dan pascapanen yang baik;
- e. Tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan Pemerintah pada penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. Masih rendahnya pendapatan petani;
- g. Menurunnya tren kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

Solusi pemecahan terhadap menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Mendorong petani untuk menerapkan usahatani konservasi pada lahan dengan kemiringan >15 % berdasarkan kemampuan yang dimiliki petani tersebut melalui penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan, juga membangun model usahatani konservasi yang terintegrasi dengan upaya peningkatan kesuburan tanah dan menekan laju degradasi lahan;
- b. Mengoptimalkan penerapan kalender tanam (katam) yang disusun berdasarkan karakteristik iklim setempat guna mengantisipasi anomali dan perubahan iklim, juga menekan serangan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, menerapkan upaya pemanenan air melalui pembangunan embung, waduk kecil;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diikuti dengan penerapan insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan pertanian yang dicakup didalamnya;
- d. Penanganan panen dan pascapanen yang baik melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan panen dan pascapanen di sentra-sentra pertanian;
- e. Menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengolahan lahan kemiringan di atas 15%;
- f. Pemberian bantuan sosial (bantuan Pemerintah) yang difokuskan pada kegiatan padat karya bagi petani melalui pengembangan desa mandiri benih, desa organik, petani berdaya, dan lokus stunting, ;
- g. Pengembangan pertanian bioindustri untuk memantapkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Bidang Pertanian

Berdasarkan urusan bidang pertanian tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, maka teridentifikasi permasalahan bidang pertanian sebagai berikut:

- a. Rendahnya produktifitas Tanaman Pangan;
- b. Rendahnya Produktifitas Tana man Hortikultura;
- c. Rendahnya Produktifitas Tanaman Perkebunan;
- d. Rendahnya Populasi Ternak;
- e. Banyaknya Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular karena minimnya anggaran untuk kesehatan hewan;
- f. Tidak adanya bangunan RPH (Rumah Potong Hewan);
- g. Kurangnya Kemitraan Usaha Penangkaran Benih/Bibit;
- h. Banyaknya Lahan Kemiringan yang sudah gundul sehingga menyebabkan kesuburan tanah berkurang.

#### 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Kabupaten Boalemo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun yakni Tahun 2023-2026. Sebagaimana dengan Rencana Pembangunan Daerah, maka pertanian 4 (empat) tahun ke depan dengan menyesuaikan penyesuaian target indikator makro dan program prioritas Nasional Tahun 2020-2024 serta Periode akhir dari tahapan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2025 dihadapkan dengan strategis yang dinamis baik domestik maupun Internasional.

- ✚ Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada Peran Sektor Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat Perekonomian Daerah Kabupaten Boalemo sebagian besar bertumpu pada kegiatan Agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pengelolaan sumberdaya agribisnis yang diharapkan mampu mewujudkan peningkatan perekonomian boalemo yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi di bidang agribisnis diharapkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibidang agribisnis meningkat.

Tujuan dari peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan oleh sasaran berikut ini :

- Meningkatnya agribisnis, peran kelembagaan ekonomi masyarakat dan kualitas sumber daya produktif daerah;
- Meningkatnya pembangunan suprastruktur, infrastruktur, dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian dan pelayanan dasar serta konektifitas Boalemo dengan daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan di daerah teluk tomini.

#### Sasaran Makro

Kinerja keberhasilan pembangunan diukur berdasarkan sasaran indikator makro pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boalemo mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan yaitu dari 6,66% pada tahun 2017 menjadi 6,7% pada tahun 2018, dan 6,7% pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 sampai dengan 2020, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan yaitu berada pada posisi -0,21%.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi makro di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB dapat memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah tersebut. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Perekonomian Kabupaten Boalemo pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 5.410,9 milyar, meningkat pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 5.491,21 milyar. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 besarnya mencapai Rp. 3.504,23 milyar, menurun pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 3.496,7milyar.

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Tahun 2020, pendapatan perkapita sebesar Rp. 20.403.690,- per tahun.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator sasaran ekonomi makro. Semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Hal ini dapat menaikkan daya beli masyarakat sehingga mampu mendorong perputaran perekonomian di Boalemo. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan mencapai 1281 orang dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 652 orang. penambahan jumlah pengangguran terbuka ini tidak lepas dari

mewabahnya pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020 yang berdampak pada mata pencarian masyarakat.

Penduduk miskin Kabupaten Boalemo pada tahun 2021 berjumlah 31.830 orang atau 19,00 %, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2020 yang berjumlah 31.630 orang atau 18,570/0. Kenaikan penduduk miskin ini tidak lepas dari pandemi Corona Desease yang melanda Indonesia yang dimulai pada tahun 2020. Imbas pandemi Corona Desease tentu memiliki dampak berantai terhadap seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan perekonomian yang mengalami penurunan intensitas. Hal inilah yang membuat inflasi tinggi dan daya beli masyarakat menurun.

### 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lembaga (K/L)

---

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara), yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, maka kelembagaan diarahkan mendukung pencapaian agenda pembangunan yaitu meningkatnya pemantapan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing serta terwujudnya reformasi birokrasi. Dalam rangka pencapaian agenda pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Pertanian perlu diperluas menangani urusan pertanian dan urusan pangan. Bertanggungjawab tidak hanya pada produksi komoditas pertanian, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemantapan ketahanan pangan. Hal ini menuntut Kementerian Pertanian untuk bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, responsif, adaptif, inovatif, dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, bahwa tugas kementerian menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dengan menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan peningkatan nilai tambah, daya saing, pemasaran hasil pertanian, dan pemantapan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi di bidang pertanian;
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan perkarantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, mendorong pertumbuhan agroindustri di hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa negara. Di sisi lain, penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa, terbesar keenam di dunia setelah India, Tiongkok, Nigeria, Amerika Serikat dan Pakistan (United Nations Population 2019). Dalam rangka menyediakan pangan masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan dalam negeri yang telah dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka sektor pertanian diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Secara nasional, diperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan diharapkan meningkat sampai 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 merupakan acuan dan arahan pembangunan pertanian untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional melalui pencapaian 5 Sasaran Utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu: (1) Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian; (3) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian; (4) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

dan Kelembagaan Pertanian Nasional; (5) dan Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif dan efisien, serta Anggaran yang akuntabel.

## 3.4 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis

### 3.4.1 Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Boalemo yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai daerah pusat agribisnis, industri, pariwisata, dan jasa melalui sinergisasi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berhirarki (Perda No, 3 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Boalemo tahun 2011-2025). RTRW berfungsi sebagai: (1) penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta (2) acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi: (1) penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RP1MD), rencana rinci tata ruang, dan rencana sektoral lainnya; (2) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; (3) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; (4) penetapan lokasi dari fungsi ruang untuk investasi; dan (5) penataan ruang kawasan strategis.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boalemo, meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Boalemo terdiri atas: pusat kegiatan wilayah (PKW) yaitu Kecamatan Tilamuta, pusat kegiatan lokal (PKL) yaitu Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Paguyaman Pantai, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kecamatan Dulupi, Kecamatan Botumoito, dan Kecamatan Paguyaman Pantai.

Sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem jaringan transportasi darat yaitu peningkatan jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan lokal primer; jaringan transportasi perkeretaapian yaitu pembangunan jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Boalemo dan pembangunan stasiun kereta api di Kecamatan Tilamuta; dan sistem jaringan transportasi laut yaitu pengembangan pelabuhan Tilamuta beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Pengaruh logis dari penerapan sistem ini adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana

kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung yang terdiri dari cagar alam Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo, kawasan hutan lindung kabupaten seluas 28.650 Ha serta kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Pulau Monduli dan kawasan pantai berhutan mangrove seluas 1.960 Ha. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air dan kawasan hutan mangrove di Kecamatan Paguyaman Pantai, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu. Kawasan perlindungan setempat meliputi rehabilitasi DAS Paguyaman, kawasan sempadan sungai dan kawasan sempadan pantai. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir.

Rencana kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi yang terdiri dari kawasan produksi terbatas (HPT) seluas 44.089 Ha, kawasan produksi tetap seluas 14.498 Ha, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 4.812 Ha. Selanjutnya kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di Kecamatan Mananggu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai.

Kawasan pertanian meliputi Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas: kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan padi terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Wonosari dan Kecamatan Paguyaman; kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan jagung dan palawija lainnya terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman, Wonosari dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas: kawasan peruntukan cengkeh, terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai; kawasan peruntukan perkebunan kakao, kelapa dan sawit, terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Sedangkan kawasan peruntukan perkebunan tebu terdapat di Kecamatan Dulupi, Wonosari dan Kecamatan Paguyaman. Kawasan peruntukan peternakan terdapat di Kecamatan Mananggu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai.

Kawasan pertambangan mineral logam emas, granit, basal, batu gamping, sirtu dan tanah liat yang ada di Kabupaten Boalemo berpengaruh terhadap peningkatan degradasi lahan dan berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang menjamin minimalisasi degradasi lahan dan pencemaran lingkungan. Kawasan industri akan berpengaruh pada alih fungsi lahan pertanian, sehingga diperlukan zonasi dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pengembangan pariwisata di daerah akan meningkatkan daya saing sektor pertanian terutama dengan pengembangan

agrowisata dan wisata perdesaan berbasis kearifan lokal pertanian. Sedangkan pengembangan kawasan pemukiman akan berpengaruh pada peningkatan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

### 3.4.2 Telaah Terhadap Hasil Kajian Lingkup Hidup Strategi Kabupaten Boalemo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan akan lebih efektif bila sejak proses formulasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya sesuai konsep sustainable development.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara materi (UUPLH No. 32 Tahun 2009, Pasal 15 meliputi: (1) identifikasi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (2) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, (3) kinerja layanan/jasa ekosistem, (4) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (5) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (6) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa kemampuan dan kesesuaian lahan cukup besar, tetapi faktor pembatas penggunaan lahan untuk pertanian juga cukup banyak, sehingga pengelolaannya harus berdasarkan karakteristik dan potensi lahan, selanjutnya ketersediaan lahan memang surplus, tetapi dengan pertimbangan laju pertumbuhan penduduk maka efisiensi penggunaan lahan pertanian menjadi prioritas utama, ketersediaan air juga cukup melimpah tetapi upaya mempertahankan keberlanjutan ketersediaan air mutlak dilaksanakan, dan daya tampung penduduk masih memenuhi, tetapi perlu pengaturan agar tidak terjadi alih fungsi lahan.

Implikasi negatif penting antara lain penurunan produksi dan produktifitas pertanian akibat perubahan luas lahan pertanian dengan adanya alih fungsi lahan, penurunan kualitas lahan serta degradasi lahan pertanian, adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang disebabkan oleh perubahan ekosistem lingkungan yang terganggu, peluang terjadinya krisis air untuk pertanian dengan adanya perubahan tata guna lahan. Implikasi positif penting antara lain: peningkatan pendapatan petani, peningkatan perekonomian daerah, dan peningkatan layanan sosial kemasyarakatan.

### 3.5 Penentu Isu-Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Boalemo dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas tanaman penghasil bahan makanan dan tanaman penghasil bahan baku industri;
2. Rendahnya populasi ternak;
3. Banyaknya kejadian dan jumlah kasus kesehatan hewan yang tertangani;
4. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
5. Penurunan kualitas lahan akibat degradasi lahan;
6. Anomali dan perubahan iklim yang berpengaruh pada musim kemarau dan penghujan serta serangan organisme pengganggu tanaman;
7. Alih teknologi tepat guna pertanian masih rendah;
8. Pengetahuan dan keterampilan petani masih kurang;
9. Tingginya ketergantungan petani terhadap bantuan langsung dari pemerintah;
10. Rendahnya pendapatan petani dan peternak;
11. Tidak adanya bangunan RPH (Rumah Potong Hewan);
12. Kurangnya Kemitraan Usaha Penangkaran Benih/Bibit.
13. Banyaknya Lahan Kemiringan yang sudah gundul.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Berdasarkan hasil analisa SWOT (Peluang, Tantangan, Kelemahan dan Kekuatan) terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dinas maka dirumuskan tujuan dalam pencapaian dinas. Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo;
2. Meningkatkan Produktifitas Pertanian.

#### 4.2 Sasaran

Berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal dinas maka dirumuskan sasaran dalam pencapaian Program dan Kegiatan Dinas. Adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Populasi Ternak;
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan;
4. Meningkatnya Pelayanan Usaha Pertanian.

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik
Meningkatnya Produktifitas Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian dan Populasi Ternak
	Meningkatnya Pelyanan Kesehatan Hewan
	Meningkatnya Pelayanan Usaha Pertanian

Gambar 4.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023- 2026

## 4.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Perangkat Daerah

---

Sesuai dengan hasil Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dapat diuraikan pada Tabel 4.1 (TC-25).

Tabel T-C 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN  
BOALEMO TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Awal Tahun 2021	Proyeksi 2022	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir Renstra
									2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Indeks Reformasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	n/a	BB	BB	BB	A	A	A
				Persentase Tindaklanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti Total Temuan OPD Tahun Berjalan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
				Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik di Lingkungan Dinas Pertanian	Jumlah BMD dalam Kondisi Baik Jumlah Total BMD	Persen	n/a	80	80	80	80	80	80
				Jumlah Penerimaan PAD di Lingkungan Dinas Pertanian	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian dalam Setahun	Tahun	n/a	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Total Jumlah ASN	Persen	n/a	25	30	35	40	40	40

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Awal Tahun 2021	Proyeksi 2022	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir Renstra
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
2	Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)			Indeks yang diterima Petani		106	107	107,15	107,25	107,35	107,45	107,45
					Indeks yang dibayar Petani	Persen							
			Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Populasi Ternak	Jumlah Produktivitas Padi	Jumlah Produksi Padi (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	46,27	46,30	46,40	46,50	46,63	46,75	46,75
					Jumlah Luas Panen Padi (ha)								
				Jumlah Produktivitas Jagung	Jumlah Produksi Jagung (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	46,31	46,45	46,57	46,65	47,21	47,32	47,32
					Jumlah Luas Panen Jagung (ha)								
				Jumlah Produktivitas Cabe	Jumlah Produksi Cabe (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	9,22	9,32	9,42	9,52	9,62	9,72	9,72
					Jumlah Luas Panen Cabe (ha)								
				Jumlah Produktivitas Tomat	Jumlah Produksi Tomat (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	14,53	14,63	14,73	14,83	14,93	15,12	15,12
					Jumlah Luas Panen Tomat (ha)								
				Jumlah Produktivitas Kelapa	Jumlah Produksi Kelapa (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	14,37	14,38	14,39	14,40	14,41	14,42	14,42
					Jumlah Luas Panen Kelapa (ha)								
				Jumlah Produktivitas Kakao	Jumlah Produksi Kakao (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	5,70	5,71	5,72	5,73	5,74	5,73	5,73
					Jumlah Luas Panen Kakao (ha)								
				Jumlah Produktivitas Cengkeh	Jumlah Produksi Cengkeh (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	2,59	2,60	2,61	2,61	2,62	2,62	2,62
					Jumlah Luas Panen Cengkeh (ha)								
				Jumlah Produktivitas Sawi	Jumlah Produksi Sawi (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	n/a	n/a	6,81	6,82	6,83	6,84	6,84
					Jumlah Luas Panen Sawi (ha)								
				Jumlah Produktivitas Kangkung	Jumlah Produksi Kangkung (Ton konfersi ke Kg) / 10	kw/ha	n/a	n/a	9,86	9,87	9,88	9,89	9,89
					Jumlah Luas Panen Kangkung (ha)								

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Awal Tahun 2021	Proyeksi 2022	Target Kinerja Pada Tahun				Kondisi Akhir Renstra
									2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
				Jumlah Populasi Sapi	Jumlah Sapi dalam setahun	ekor	44.667	44.668	44.669	44.670	44.671	44.672	44.672
				Jumlah Populasi Kambing	Jumlah Kambing dalam setahun	ekor	12.048	12.050	12.052	12.054	12.058	12.060	12.060
				Jumlah Populasi Babi	Jumlah Babi dalam setahun	ekor	n/a	4.120	4.125	4.130	4.135	4.140	4.140
				Jumlah Populasi Ayam/Unggas	Jumlah Ternak Ayam/Unggas dalam setahun	ekor	402.173	402.183	402.193	402.203	402.213	402.223	402.223

# BAB V

## STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategis

---

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, rasional, dan komprehensif. Strategi ini digunakan dinas untuk melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuannya. Adapun strategi mencapai tujuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo meliputi:

1. Memetakan potensi sumberdaya lahan berdasarkan karakteristik dan kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas tanaman penghasil bahan pangan dan tanaman perkebunan spesifik lokasi;
2. Mengoptimalkan potensi sumberdaya pertanian melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, dan usahatani konservasi;
3. Perbaiki skala teknis dan ekonomis usaha tani;
4. Pengendalian konversi lahan pertanian yang subur;
5. Perbaiki teknologi budidaya dan penanganan pasca panen (perbaikan daya saing);
6. Peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan;
7. Peningkatan populasi ternak;
8. Peningkatan pengendalian dan penanganan penyebaran penyakit ternak;
9. Peningkatan kualitas penanganan pasca panen untuk perbaikan mutu dan kehilangan hasil panen;
10. Pengembangan agroindustri (perolehan nilai tambah);
11. Penyediaan dana pengembangan pertanian dan asuransi pertanian;
12. Penguatan kelembagaan Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Koperasi Tani (Koptan);
13. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyuluh, petani dan pelaku agroindustri perdesaan;
14. Biaya Operasional kepada penyuluh pertanian;
15. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pertanian;
16. Pemberian bantuan sarana produksi pertanian (Saprodi) guna peningkatan produksi dan produktifitas tanaman penghasil bahan pangan, hijauan pakan ternak dan tanaman perkebunan yang spesifik lokasi;
17. Menyediakan sarana dan prasarana budidaya tanaman melalui Bimtek, bantuan alat dan mesin pertanian, dan unit pengolahan pupuk organik (UPPO), serta unit pengolahan hasil pertanian;
18. Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui Gerdal (Gerakan Pengendalian Masal), penyediaan buffer stock pestisida dan penguatan brigade Pengendalian Hama Terpadu (PHT);

19. Meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti Jalan Usaha Tani, Irigasi Air Tanah Dangkal, Rehab jaringan irigasi Tersier RJIT);
20. Meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani infrastruktur di luar areal usahatani seperti irigasi air permukaan (bendung, pompanisasi, dan pipanisasi), dam parit, embung;
21. Memfasilitasi ketersediaan prasarana dan sarana penangkar benih/bibit serta pengembangannya dalam rangka mendukung desa mandiri benih/bibit;
22. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha pelayanan jasa alsintan (Brigade Alsintan) guna mendukung peningkatan produktifitas pertanian;
23. Menekan kerusakan hasil panen dan pasca panen serta perbaikan kualitas hasil pertanian melalui penyediaan lantai jemur, rice milling unit (RMU) dan pengolahan hasil pertanian;
24. Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani melalui pemberdayaan petani dalam rangka peningkatan produktivitas, pengetahuan dan ketrampilan petani;
25. Membantu terciptanya peluang usaha agribisnis, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian;
26. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat;
27. Melakukan Konservasi Lahan Kemiringan dengan Teknologi Terasing atau Melalui Integrasi Tanaman Tahunan dan Tanaman Pangan.

## 5.2 Kebijakan

---

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo menetapkan kebijakan program kegiatan tahun 2023-2026 antara lain :

1. Menyusun peta pewilayahan komoditas pertanian, master plan dan bussines plan pengembangan kawasan komoditas unggulan daerah;
2. Melaksanakan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, dan usahatani konservasi untuk mengoptimalkan potensi komoditas pertanian menjadi unggulan daerah;
3. Memberikan bantuan sarana produksi pertanian (benih unggul, pupuk dan pestisida) untuk meningkatkan luas tanam, luas panen, produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan yang spesifik lokasi;
4. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan penyediaan sarana prasarana budidaya tanaman secara terpadu dengan menerapkan GAP (good agriculture practices);
5. Melaksanakan pelatihan, pembinaan dan penyediaan sarana prasarana pengendalian hama penyakit tanaman secara terpadu;
6. Menyediakan insfrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, irigasi air tanah dangkal, dan rehab jaringan irigasi tersier (RJIT);

7. Menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani infrastruktur di luar areal usahatani seperti irigasi air permukaan (bendung, pompanisasi, dan pipanisasi), dam parit, dan embung;
8. Menyediakan benih unggul bagi petani dan mendukung desa mandiri benih melalui penyediaan prasarana dan sarana penangkar benih;
9. Meningkatkan luas areal pertanaman melalui penyediaan sarana dan prasarana (Brigade Alsintan);
10. Menyediakan sarana penanganan panen dan pasca panen melalui pembangunan lantai jemur, rice milling unit (RMLI), dan pengolahan hasil pertanian;
11. Fasilitasi jaminan usahatani dan usaha perkebunan melalui asuransi usaha pertanian;
12. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam upaya penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi melalui pelatihan, pembinaan dan pembangunan kebun percontohan (laboratorium lapangan);
13. Memediasi petani dalam usaha kemitraan untuk penyediaan sarana produksi, permodalan dan pemasaran hasil pertanian;
14. Meningkatkan jejaring kerja (networking) dalam upaya percepatan pembangunan sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Berikut Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang disajikan dalam tabel TC-26

;

**Tabel TC-26**

**Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang berkelanjutan Bidang Pertanian	Meningkatnya Agribisnis, Peran Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kualitas Sumber Daya Produktif Daerah	Pengembangan Agribisnis Sektoral dan Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah dengan Pola Pengelolaan Bermuansa Agribisnis yang utuh dan menyeluruh berdasarkan Keunggulan Komparatif, Kompetatif, Kooperatif</li> <li>2. Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Unggulan</li> <li>3. Pengembangan Temak Unggulan Daerah yang berintegrasi dengan Pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilakukan dengan pola Agribisnis</li> </ol>

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indicator hasil dan indicator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo selama periode Tahun 2023-2026 seperti tertuang pada Tabel TC-27 :



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Ke-								Unit Kerja SOPD		Lokasi			
						2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			Penanggung Jawab		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Populasi Temak	3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Hasil Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	2.048.143.000,00	100%	2.065.220.550,00	100%	2.082.725.050,00	100%	2.100.667.150,00	100%	2.100.667.150,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian		
			3 27 02 2 01	Pergawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pergawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	620.000.000,00	100%	620.000.000,00	100%	620.000.000,00	100%	620.000.000,00	100%	620.000.000,00				
			3 27 02 2 01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokal	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokal	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00		
			3 27 02 2 01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00	12 Laporan	600.000.000,00		
			3 27 02 2 02	Rengdian Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Ternak, dan Mikro Organisme Keunggulan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Rengdian SDG Hewan Ternak	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00	100%	800.000.000,00		
			3 27 02 2 02 01	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00	12 Laporan	800.000.000,00		
			3 27 02 2 03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Peningkatan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Bahan Pakan Ternak	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00		
			3 27 02 2 03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		
			3 27 02 2 03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		
			3 27 02 2 06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang sumbernya di (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	100%	608.143.000,00	100%	625.220.550,00	100%	642.725.050,00	100%	660.667.150,00	100%	660.667.150,00	100%	660.667.150,00		
			3 27 02 2 06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	1565 ekor	598.143.000,00	1575 ekor	615.220.550,00	1585 ekor	632.725.050,00	1595 ekor	650.667.150,00	1595 ekor	650.667.150,00	1595 ekor	650.667.150,00		
			3 27 02 2 06 02	Pengadaan Hewan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		
			3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Hasil Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	2.345.890.000,00	100%	2.345.890.000,00	100%	2.345.890.000,00	100%	2.345.890.000,00	100%	2.345.890.000,00	100%	2.345.890.000,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian
			3 27 03 2 01	Rengdian Prasarana Pertanian	Persentase Hasil Rengdian Prasarana Pertanian	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00		
			3 27 03 2 01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pemanfaatan Teknologi Konservasi Lahan Kemiringan	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00	1 Dok	100.000.000,00		
			3 27 03 2 01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00		
			3 27 03 2 01 03	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00		
			3 27 03 2 02	Rertangunan Prasarana Pertanian	Persentase Rertangunan Prasarana Pertanian	100%	2.095.890.000,00	100%	2.095.890.000,00	100%	2.095.890.000,00	100%	2.095.890.000,00	100%	2.095.890.000,00	100%	2.095.890.000,00		
			3 27 03 2 02 01	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	2 unit	240.000.000,00	2 unit	240.000.000,00	2 unit	240.000.000,00	2 unit	240.000.000,00	2 unit	240.000.000,00	2 unit	240.000.000,00		
			3 27 03 2 02 02	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	1 unit	120.000.000,00	1 unit	120.000.000,00	1 unit	120.000.000,00	1 unit	120.000.000,00	1 unit	120.000.000,00	1 unit	120.000.000,00		
3 27 03 2 02 03	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	2 unit	380.000.000,00	2 unit	380.000.000,00	2 unit	380.000.000,00	2 unit	380.000.000,00	2 unit	380.000.000,00	2 unit	380.000.000,00					
3 27 03 2 02 04	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00					
3 27 03 2 02 05	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00	1 unit	150.000.000,00					
3 27 03 2 02 06	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00					
3 27 03 2 02 07	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00	1 unit	200.000.000,00					
3 27 03 2 02 08	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	7 unit	70.000.000,00	7 unit	70.000.000,00	7 unit	70.000.000,00	7 unit	70.000.000,00	7 unit	70.000.000,00	7 unit	70.000.000,00					
3 27 03 2 02 09	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	2 unit	685.890.000,00	2 unit	685.890.000,00	2 unit	685.890.000,00	2 unit	685.890.000,00	2 unit	685.890.000,00	2 unit	685.890.000,00					
3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian yang dikendalikan	100%	370.168.300,00	100%	373.254.800,00	100%	376.418.450,00	100%	379.661.200,00	100%	379.661.200,00	100%	379.661.200,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian			
3 27 05 2 01	Rengdian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Rengdian, Pencegahan, dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	370.168.300,00	100%	373.254.800,00	100%	376.418.450,00	100%	379.661.200,00	100%	379.661.200,00	100%	379.661.200,00					
3 27 05 2 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 ha	20.000.000,00	2 ha	20.000.000,00	2 ha	20.000.000,00	2 ha	20.000.000,00	2 ha	20.000.000,00	2 ha	20.000.000,00					
3 27 05 2 01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area yang terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2 ha	200.168.300,00	2 ha	203.254.800,00	2 ha	206.418.450,00	2 ha	209.661.200,00	2 ha	209.661.200,00	2 ha	209.661.200,00					
3 27 05 2 01 03	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2 ha	150.000.000,00	2 ha	150.000.000,00	2 ha	150.000.000,00	2 ha	150.000.000,00	2 ha	150.000.000,00	2 ha	150.000.000,00					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun Ke-								Unit Kerja SOPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	100%	338.796.400,00	100%	341.621.300,00	100%	344.516.850,00	100%	347.484.750,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian		
			3 27 07 2 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelas Kelompok Tani	100%	338.796.400,00	100%	341.621.300,00	100%	344.516.850,00	100%	347.484.750,00				
			3 27 07 2 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00	1 unit	10.000.000,00				
			3 27 07 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	218.796.400,00	1 unit	218.796.400,00	1 unit	218.796.400,00	1 unit	218.796.400,00				
			3 27 07 2 01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	10.000.000,00	1 unit	12.824.900,00	1 unit	15.720.450,00	1 unit	18.688.350,00				
			3 27 07 2 01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00	1 unit	100.000.000,00				
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	322.736.800,00	100%	325.427.800,00	100%	328.186.100,00	100%	331.013.300,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian		
			3 27 04 2 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Perang Jangam Penyakit Hewan	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00				
			3 27 04 2 01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00				
			3 27 04 2 01 02	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkendali	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00				
			3 27 04 2 02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	100%	122.736.800,00	100%	125.427.800,00	100%	128.186.100,00	100%	131.013.300,00				
			3 27 04 2 02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	22.736.800,00	1 Laporan	25.427.800,00	1 Laporan	28.186.100,00	1 Laporan	31.013.300,00				
			3 27 04 2 02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00				
		Meningkatnya Pelayanan Usaha Pertanian	3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertanian	100%	141.040.600,00	100%	142.216.600,00	100%	143.422.000,00	100%	144.657.550,00	Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo	Dinas Pertanian		
			3 27 06 2 02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Hasil Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	100%	141.040.600,00	100%	142.216.600,00	100%	143.422.000,00	100%	144.657.550,00				
			3 27 06 2 02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1 Duk	141.040.600,00	1 Laporan	142.216.600,00	1 Laporan	143.422.000,00	1 Laporan	144.657.550,00				

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai strategis dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu dianalisa pengukuran pencapaian kinerja, sehingga data kinerja yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai standar operasional prosedur (SOP), Formula Pengukuran Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, dengan menggunakan beberapa metode pengukuran, yaitu :

- ✓ Persentase adalah bagian dari keutuhan yang dinyatakan dengan persen atau bagian yang diperkirakan dengan menggunakan angka persen;
- ✓ jumlah adalah menghitung beberapa banyak tentang sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu dalam artiannya mengukur menggunakan metode angka;
- ✓ Peningkatan Produktifitas adalah menghitung jumlah hasil panen (Output) berdasarkan jumlah penanaman yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan pelaku utama (Petani);
- ✓ Populasi Ternak dinyatakan sebagai jumlah ternak yang hidup pada suatu wilayah pada periode tertentu dan biasanya dinyatakan dalam tahun.

## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program Pembangunan Daerah.

**Tabel 7.1**  
**TC-28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Produktivitas Padi	kw/ha	46,30	46,40	46,50	46,63	46,75	46,75
2	Produktivitas Jagung	kw/ha	46,45	46,57	46,65	47,21	47,32	47,32
3	Produktivitas Cabe	kw/ha	9,32	9,42	9,52	9,62	9,72	9,72
4	Produktivitas Tomat	kw/ha	14,63	14,73	14,83	14,93	15,12	15,12
5	Produktivitas Kelapa	kw/ha	14,38	14,39	14,40	14,41	14,42	14,42
6	Produktivitas Kakao	kw/ha	5,71	5,72	5,73	5,74	5,73	5,73
7	Produktivitas Cengkeh	kw/ha	2,60	2,61	2,61	2,62	2,62	2,62
8	Produktivitas Sawi	kw/ha	n/a	6,81	6,82	6,83	6,84	6,84
9	Produktivitas Kangkung	kw/ha	n/a	9,86	9,87	9,88	9,89	9,89
10	Produktivitas Terong	kw/ha	n/a	24,68	24,68	24,69	24,69	24,69
11	Produktivitas Kacang Panjang	kw/ha	n/a	15,21	15,22	15,23	15,24	15,25
12	Produktivitas Semangka	kw/ha	n/a	66,61	66,62	66,63	66,64	66,64
13	Produktivitas Durian	kw/ha	n/a	0,55	0,56	0,56	0,57	0,57
14	Populasi Sapi	ekor	44.668	44.686	44.706	44.762	44.742	44.742
15	Populasi Kambing	ekor	12.050	12.052	12.054	12.058	12.060	12.060
16	Populasi Babi	ekor	4.120	4.420	4.720	5.020	5.320	5.320
17	Populasi Ayam/Unggas	ekor	402.273	402.323	402.423	402.573	402.648	402.648
18	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran diatas, maka dirumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**Formula Pengukuran**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Lokasi				
Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Populasi Ternak	3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Hasil Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian}}{\text{Jumlah Sarana Pertanian yang tersedia}} \times 100$	Dinas Pertanian				
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	$\frac{\text{Hasil Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian}}{\text{Jumlah Sarana Pertanian yang tersedia}} \times 100$					
			3 27 02 2 01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang diawasi					
			3 27 02 2 01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang di dampingi					
			3 27 02 2 02	Pengadaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanitaan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Pemafaatan SDG Hewan/Tanaman	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Pemafaatan SDG Tanaman}}{\text{Jumlah Pemafaatan SDG Tanaman}} \times 100$					
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Tanaman				
			3 27 02 2 03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Bahan Pakan Ternak	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Bahan Pakan Ternak}}{\text{Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Peredaran Bahan Pakan Ternak}} \times 100$					
			3 27 02 2 03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil					
			3 27 02 2 03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak					
			3 27 02 2 06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1(stu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	$\frac{\text{Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang diadakan}}{\text{Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang ditargetkan}} \times 100$					
			3 27 02 2 06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya					
			3 27 02 2 06 02	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota					
			3 27 03	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Hasil Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	$\frac{\text{Hasil Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pertanian}}{\text{Target Pembangunan dan Pengembangan Pertanian}} \times 100$	Dinas Pertanian			
					Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Hasil Penyusunan Pengembangan Prasarana Pertanian	$\frac{\text{Hasil Penyusunan Dokumen LP2B dan Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian dan Komoditas Pertanian}}{\text{Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Dokumen LP2B dan Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian dan Komoditas Pertanian}} \times 100$				
					3 27 03 2 01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pemanfaatan Teknologi Konservasi Lahan Keringanan		Jumlah Pemanfaatan Teknologi Konservasi Lahan Keringanan		
					3 27 03 2 01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		Jumlah Luss Lahan Pertanian		
					3 27 03 2 01 03	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Jumlah Luss Lahan Pertanian sesuai Pemanfaatan Komoditi		
					3 27 03 2 02	Rembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Rembangunan Prasarana Pertanian		$\frac{\text{Jumlah Rembangunan Prasarana Pertanian yang tersedia}}{\text{Jumlah Rembangunan Prasarana Pertanian yang ditargetkan}} \times 100$		
							Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	
					3 27 03 2 02 02	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara		Jumlah Embung Pertanian yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara		
3 27 03 2 02 03	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara			Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara						
3 27 03 2 02 04	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara			Jumlah DAM Parit yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara						
3 27 03 2 02 05	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara			Jumlah Long Storage yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara						
3 27 03 2 02 06	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara			Jumlah Pintu Air yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara						
3 27 03 2 02 07	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara								
3 27 03 2 02 08	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara								
3 27 03 2 02 09	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, rehabilitas, dan dipelihara								

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Lokasi
			3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Bencana Pertanian yang dikendalikan	$\frac{\text{Hasil Penanggulangan Bencana Pertanian yang dikendalikan}}{\text{Jumlah Penanggulangan Bencana Pertanian yang dikendalikan}} \times 100$	Dinas Pertanian
			3 27 05 2 01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Pengendalian, Peranginan, Pencegahan, dan Penanggulangan Bencana Pertanian	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Pengendalian, Peranginan, Pencegahan, dan Penanggulangan Bencana Pertanian}}{\text{Jumlah Pelaksanaan Pengendalian, Peranginan, Pencegahan, dan Penanggulangan Bencana Pertanian}} \times 100$	
			3 27 05 2 01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3 27 05 2 01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area yang terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area yang terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			3 27 05 2 01 03	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			3 27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	$\frac{\text{Hasil Peningkatan Kelas Kelompok Tani}}{\text{Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani}} \times 100$	Dinas Pertanian
			3 27 07 2 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Naik Kelas Kelompok Tani	$\frac{\text{Jumlah Naik Kelas Kelompok Tani}}{\text{Target Naik Kelas Kelompok Tani}} \times 100$	
			3 27 07 2 01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	
			3 27 07 2 01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	
			3 27 07 2 01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
			3 27 07 2 01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Hewan	3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	Persentase Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah}}{\text{Target Pelaksanaan Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah}} \times 100$	Dinas Pertanian
			3 27 04 2 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	$\frac{\text{Hasil Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan}}{\text{Target Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan}} \times 100$	
			3 27 04 2 01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	
			3 27 04 2 01 02	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkontrol	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkontrol	
			3 27 04 2 02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan}}{\text{Target Pemeriksaan Kesehatan Hewan}} \times 100$	
			3 27 04 2 02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
			3 27 04 2 02 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pelayanan Usaha Pertanian	3 27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertanian	$\frac{\text{Hasil Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertanian}}{\text{Target Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertanian}} \times 100$	Dinas Pertanian
			3 27 06 2 02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Hasil Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	$\frac{\text{Hasil Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan}}{\text{Target Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan}} \times 100$	
			3 27 06 2 02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri dalam Negeri No.77 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 4 (empat) tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dapat direview, jika ada perubahan signifikan.

Demikian Renstra ini disusun untuk dilaksanakan kedepan.

Dulupi, Juli 2022  
Kepala Dinas  
  
Roslina R. Karim, SP  
Pembina Tkt. I IV/b  
NIP. 19680720 199903 2 004